



Judul : Pengesahan Anggaran Gedung DPR
Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 11

EDITORIAL

Pengesahan Anggaran Gedung DPR

KEPUTUSAN Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk membangun gedung baru parlemen dilakukan dengan senyap. Pemerintah tak semestinya menyetujui anggaran proyek itu. Di tengah kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya pulih dan anggaran negara yang minim, pemerintah seharusnya mengutamakan penggunaan anggaran untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terlebih Presiden Joko Widodo dalam pidato tentang Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2018 dan Nota Keuangan pada 16 Agustus lalu dengan jelas menyebutkan bahwa RAPBN tahun depan harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Khususnya dalam upaya mengentaskan masyarakat miskin, mengatasi ketimpangan, dan membuka lapangan pekerjaan.

Tekad presiden itu, pada kenyataannya, tak sejalan dengan keputusan yang diambil. Keinginan politikus Senayan menghuni kantor baru, yang direncanakan menelan biaya lebih dari Rp 1 triliun, itu bakal segera terwujud. Pemerintah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 5,7 triliun bagi DPR dalam pagu anggaran 2018. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan kesepakatan dicapai dalam rapat antara pemerintah pusat dan DPR pada 9 Oktober lalu.

Jumlah tersebut naik dari anggaran DPR tahun ini yang sebesar Rp 4,3 triliun. Rp 601 miliar dari dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan tahap awal gedung DPR sebesar Rp 320 miliar dan sisanya untuk alun-alun demokrasi. Dana itu dirancang sebagai kucuran pertama anggaran tahun jamak pembangunan kompleks parlemen empat tahun ke depan.

Dewan terus mendesak pemerintah mengabulkan permintaannya di tengah kebijakan moratorium pembangunan gedung pemerintahan. DPR beralasan butuh ruang kerja lebih besar, yakni 117 meter persegi per orang. Rencananya, di dalam ruangan anggota DPR terdapat fasilitas ruang rapat seluas 20 meter persegi dan ruang istirahat 10 meter persegi. Sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga DPR menyatakan Kompleks Parlemen Senayan, yang berkapasitas 800 orang, kini diisi oleh 6.000 orang.

DPR tak patut mendapatkan fasilitas berlebih. Apalagi kinerja mereka bisa dibilang buruk. Target legislasi dari tahun ke tahun tak pernah terpenuhi. Dari target 50 rancangan undang-undang yang seharusnya dibahas tahun lalu, hanya 10 yang disahkan. Tahun sebelumnya bahkan lebih buruk, DPR hanya menyelesaikan tiga undang-undang dari target 37. Mereka malah mengerjakan hal-hal yang ditentang banyak kalangan, misalnya merecoki pekerjaan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat hak angket.

Dewan seharusnya dapat menunda rencana membangun gedung baru dengan mempertimbangkan kondisi anggaran dan perekonomian negara. Pembangunan gedung baru beserta fasilitas tambahan, seperti alun-alun demokrasi, pusat pengujung, dan museum, bukanlah keperluan yang mendesak. ●